EFEKTIFITAS PROGRAM *TAX AMNESTY* TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK

Buyung, Muldri P.J. Pasaribu, Rony Andre Christian Naldo

Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, ronyandre87@gmail.com

Abstrak

Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, yang salah satunya dengan membuat kebijakan Program *Tax Amnesty* Jilid 1. Program *Tax Amnesty* Jilid 1 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Pematangsiantar. Program *Tax Amnesty* Jilid 1 diharapkan efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang secara otomatis efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui efektifitas Program *Tax Amnesty* Jilid 1 terhadap peningkatan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan Teori Efektifitas Hukum yang bersinergis dengan Teori Kesadaran Hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program *Tax Amnesty* Jilid 1 di Kota Pematangsiantar belum efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang terhadap fakta hukum tersebut diajukan 2 (dua) solusi.

Kata Kunci: Efektifitas, *Tax Amnesty*, Kesadaran.

Abstract

The Government is always trying to increase revenue from the tax sector, one of which is by creating a Tax Amnesty Program Volume 1 policy. The Tax Amnesty Program Volume 1 is implemented in all regions of Indonesia, one of which is in Pematangsiantar City. The Tax Amnesty Volume 1 Program is expected to be effective in increasing Taxpayers' legal awareness, which will automatically be effective in increasing revenue from the tax sector. This research aims to analyze to determine the effectiveness of the Tax Amnesty Volume 1 Program in increasing the legal awareness of Taxpayers in Pematangsiantar City. This research is a type of normative research, using a holistic normative juridical method, using a primary data and secondary data. The data obtained was analyzed deductively qualitatively, which was further analyzed based on legal norms and Theory of Legal Effectiveness which is synergistic with the Theory of Legal Awareness. The results of the research concluded that the Tax Amnesty Program Volume 1 in Pematangsiantar City had not been effective in increasing Taxpayers' legal awareness, for which 2 (two) solutions were proposed regarding these legal facts.

Keywords: Effectiveness, Tax Amnesty, Awareness.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum.¹ Penegasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa

¹ Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2019), *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 6, No. 1, hal. 44.

Efektifitas Program Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (*grund norm*).² Penegasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 13 Tahun 2022), yang menentukan bahwa: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.

Hukum merupakan bagian penting dari kehidupan orang.³ Dalam hukum, istilah “*person* (orang)” mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*persona moralis/legal person/legal entity*). Ke 2 (dua)-nya adalah subjek hukum, sehingga ke 2 (dua)-nya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum (*drager van wettelijke rechten en plichten*).⁴

Sebagai negara hukum, sesuai dengan cita hukum, maka Pemerintah (negara dalam arti sempit) berusaha untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional. Terkait hal tersebut, Pemerintah membutuhkan sumber penerimaan, yang salah satunya bersumber dari sektor pajak. Berdasarkan UUD 1945, dasar hukum pemungutan pajak adalah ketentuan Pasal 23 A, yang menentukan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pajak merupakan kontribusi wajib subjek Hukum Pajak (orang pribadi maupun badan) kepada Pemerintah, yang terutang, bersifat mengikat dan memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi sumber penerimaan Pemerintah yang sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional.

Pemerintah setiap tahunnya senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satunya dengan membuat kebijakan Program Pengampunan Pajak (Program *Tax Amnesty*). *Tax amnesty* merupakan kebijakan penghapusan nilai pajak yang seharusnya dibayar, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Wajib Pajak (WP) dalam hal ini hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Program *Tax Amnesty* merupakan sarana dan kebijakan Pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, serta untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum WP.

Program *Tax Amnesty* Ketiga (Jilid 1) dilaksanakan Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pula halnya di Kota Pematangsiantar, via Kantor

² Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2021). *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, hal. 7-8.

³ *Ibid*, hal. 1.

⁴ Ridwan Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, hal. 4.

Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar (KPP Pratama Pematangsiantar). Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* memiliki sejarah, dan melalui pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1 (khususnya di Kota Pematangsiantar) tentunya diharapkan Pemerintah dapat efektif meningkatkan kesadaran hukum WP (orang pribadi), yang secara otomatis tentunya efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif holistik, yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan data yang digunakan hanya sebagai suplemen dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan Teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto yang bersinergis dengan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Paul Scholten.

3. Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Penting Bagi Pemerintah

Sebagai negara hukum, guna mencapai cita hukum, maka Pemerintah berusaha memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional. Untuk itu Pemerintah membutuhkan sumber penerimaan, yang salah satunya adalah bersumber dari sektor pajak. Pasal 23 A UUD 1945 merupakan dasar hukum konstitusional Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak bagi WP.

Menurut N.J. Feldman:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum”.⁵

Menurut Rony Andre Christian Naldo:

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada Pemerintah (Pusat maupun Daerah), berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat dapat dipaksakan, dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan berbagai

⁵ Richard Burton, dan Wirawan B. Ilyas. (2004). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 4.

program pembangunan yang telah dicanangkan, di pusat maupun di daerah".⁶

Menurut Budi Raharjo:

"Untuk menegakkan kemandirian dalam membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional dapat ditempuh dengan jalan mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara. Saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan negara karena pembiayaan pembangunan pada masa yang akan datang sangat tergantung pada pajak. Sektor perpajakan memegang peranan penting dan strategis dalam penerimaan negara. Peningkatan pendapatan negara terutama dari sektor pajak, memberikan sumbangan positif dalam keuangan negara".⁷

3.1. Sejarah Pelaksanaan Program Tax Amnesety di Indonesia

Pembangunan nasional merupakan wujud dari pelaksanaan Sila ke 5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah membutuhkan dana untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas, dan dana dibutuhkan tersebut salah satunya bersumber dari sektor pajak.⁸

Salah satu kebijakan Pemerintah pada sektor pajak adalah membuat Program *Tax Amnesty*. Menurut Aviliani:

"Program *Tax Amnesty* telah 4 (empat) kali dibuat di Indonesia, yakni pada tahun 1964, 1984, 2016, dan 2022. Program *Tax Amnesty* pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Penetapan kebijakan Program *Tax Amnesty* Pertama dilaksanakan dengan penerbitan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak".⁹

Melalui kebijakan Program *Tax Amnesty* Pertama, Pemerintah pada saat itu berharap mampu menggalang dana untuk menjalankan Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Latar belakang dibuatnya kebijakan Program *Tax Amnesty* Pertama adalah dikarenakan pendapatan Pemerintah dari sektor pajak tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan tarif pajak yang tinggi, dan inflasi yang terus meningkat setiap tahun, yang membuat masyarakat saat itu enggan membayar

⁶ Mardona Siregar. (2024). *Rekontruksi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Disertasi, Program Studi Hukum, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hal. 36.

⁷ Budi Raharjo, et.al. (2003). *Dasar-dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Pematangan dan Penyetoran, Pelaporan*. Jakarta: Eko Jaya, hal. 1.

⁸ Buyung. (2023). *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)*. Pematangsiantar: Tesis, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, hal. 4.

⁹ *Ibid*, hal. 6.

Efektifitas Program Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak

pajak. Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Pertama dikategorikan berhasil, karena melampaui target yang diperkirakan. Pelaksanaannya ditambahkan selama 2 (dua) tahun.¹⁰

Program *Tax Amnesty* Kedua, dilaksanakan pada tahun 1984, yakni pada era pemerintahan Presiden Soeharto, pasca dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983. Latar belakang dibuatnya kebijakan Program *Tax Amnesty* Kedua adalah dikarenakan Pemerintah mengalami kesulitan penerimaan akibat penurunan harga minyak yang drastis, yang disertai pula dengan penurunan produksi. Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Kedua dikategorikan kurang berhasil karena minimnya Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan adanya penghitungan yang rumit, sehingga banyak WP yang tidak mengikuti.¹¹

Program *Tax Amnesty* Jilid 1, dilaksanakan pada tahun 2016, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (UU Nomor 11 Tahun 2016). Latar belakang dibuatnya kebijakan Program *Tax Amnesty* Jilid 1 adalah dikarenakan untuk menambah penerimaan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga akan lebih *suistenable*, serta untuk membantu stabilitas ekonomi makro.¹² Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1 dikategorikan terlaksana dengan baik.¹³ Pelaksanaannya dalam 3 (tiga) periode, yakni 28 Juni sampai dengan (sd) 30 September 2016, 1 Oktober sd 31 Desember 2016, dan 1 Januari sd 31 Maret 2017.

Program *Tax Amnesty* Keempat (Jilid 2), dilaksanakan pada tahun 2022, dengan dasar hukum UU Nomor 11 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021). Latar belakang dibuatnya kebijakan Program *Tax Amnesty* Jilid 2 adalah dikarenakan masih banyak WP yang menyimpan kekayaan di luar negeri yang belum dilaporkan. Dengan adanya penerbitan UU Nomor 7 Tahun 2021, Program *Tax Amnesty* Jilid 2 berubah nama menjadi “Program Pengungkapan Sukarela”. Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 2 dikategorikan telah terlaksana dengan baik. Menurut Tira Santia: “Hal tersebut dikarenakan meningkatnya penerimaan Program Pengungkapan Sukarela yang sangat signifikan pada akhir program”.¹⁴ Pelaksanaannya dimulai dari Januari 2022 sd Juni 2022.¹⁵

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hal. 7.

¹² <https://www.kemenkeu.go.id/tax-amnesty> (diakses tanggal 20 Maret 2024).

¹³ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatrisasi-rp146-triliun/0/berita> (diakses tanggal 20 Maret 2024).

¹⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5000459/pps-tax-amnesty-jilid-ii-berakhir-intip-sederet-hasil-lengkapny> (diakses tanggal 20 Maret 2024).

¹⁵ <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/tax-amnesty-jilid-2> (diakses tanggal 20 Maret 2024).

3.2. Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid 1 Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak di Kota Pematangsiantar

Program *Tax Amnesty* Jilid 1 merupakan program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2016. Program *Tax Amnesty* Jilid 1 dilaksanakan Pemerintah *casu quo* (cq) Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) cq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil Dirjen Pajak) cq KPP Pratama.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan dari sektor pajak;
2. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
3. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
4. Meningkatkan kesadaran hukum WP.

Program *Tax Amnesty* Jilid 1 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pula halnya di Kota Pematangsiantar, via KPP Pratama Pematangsiantar. Melalui pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1, tentunya Pemerintah cq Menteri Keuangan cq Dirjen Pajak cq Kanwil Dirjen Pajak Sumatera Utara II cq KPP Pratama Pematangsiantar berharap agar secara hukum pelaksanaannya dapat efektif guna meningkatkan kesadaran hukum WP, yang secara otomatis efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. WP yang dimaksud secara khusus adalah WP orang pribadi.

Mengenai istilah “efektif”, efektif berarti taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Soerjono Soekanto telah mengemukakan Teori Efektifitas Hukum. Menurut Soerjono Soekanto:

“Hukum dikategorikan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum”.¹⁶

Mengenai istilah “kesadaran hukum”, kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering

¹⁶ Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, hal. 80. Sebagaimana dikutip dari Buyung. *Op.cit*, hal. 18.

Efektifitas Program Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak

dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum.¹⁷ Paul Scholten telah mengemukakan Teori Kesadaran Hukum. Menurut Paul Scholten:

“Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa itu seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan”.¹⁸

Telah dipaparkan bahwa melalui pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1, tentunya Pemerintah cq Menteri Keuangan cq Dirjen Pajak cq Kanwil Dirjen Pajak Sumatera Utara II cq KPP Pratama Pematangsiantar berharap agar secara hukum pelaksanaannya dapat efektif guna meningkatkan kesadaran hukum WP, yang secara otomatis efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Tri Bowo:

“Masih rendah jumlah WP yang mengikuti Program *Tax Amnesty* Jilid 1. Rendahnya jumlah WP yang mengikuti Program *Tax Amnesty* Jilid 1, bukan disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak, karena langsung diberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri pajaknya. Rendahnya jumlah WP yang mengikuti Program *Tax Amnesty* Jilid 1, disebabkan kurangnya nilai nasionalis”.¹⁹

Berdasarkan pendapat Tri Bowo, ditegaskan bahwa pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1 belum efektif guna meningkatkan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa WP di Kota Pematangsiantar, diketahui dan ditegaskan perihal berbagai alasan para WP tersebut memiliki kesadaran hukum untuk mengikuti pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

NO	INISIAL WP	NPWP	USAHA	ALASAN IKUT PELAKSANAAN PROGRAM TAX AMNESTY
1	A.S.	√	Distributor Makanan dan Minuman.	- Masih Ada Harta yang Belum Diungkap.
2	H.R.	√	Industri Pengolahan Kopi.	- Masih Ada Harta yang Belum Diungkap.

¹⁷ Ellya Rosana. (2014). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, v10n1, hal. 4.

¹⁸ Soedikno Mertokusumo. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, hal. 2. Sebagaimana dikutip dari Rony Andre Christian Naldo. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media, hal. 225.

¹⁹ <https://www.hetanews.com/article/86074/tax-amnesty-berakhir-maret-wajib-pajak-diharapkan-mengikuti-program> (diakses tanggal 14 April 2024).

***Efektifitas Program Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum
Wajib Pajak***

3	C.H.	X	Jasa Pengangkutan.	- Belum Pernah Lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT); - Banyak Harta yang Mau Diungkapkan.
4	H.M.	X	Distributor Telepon Seluler.	- Belum Pernah Lapor SPT; - Belum Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5	J.T.	√	Distributor Hasil Olahan Ikan.	- Sudah Lapor SPT, Tetapi Belum Pernah Lapor Harta.

Tabel 1. Daftar Beberapa WP di Kota Pematangsiantar yang Memiliki Kesadaran Hukum Untuk Mengikuti Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1.

Sumber: Diolah Para Penulis.

Berdasarkan data pada Tabel 1. di atas, ditegaskan berbagai dari alasan beberapa WP di Kota Pematangsiantar mengikuti pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1, sebagai berikut:

1. Masih ada dan/atau banyak harta yang belum diungkap;
2. Belum pernah lapor SPT;
3. Belum memiliki NPWP;
4. Sudah lapor SPT, akan tetapi belum pernah lapor harta.

Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hukum dikategorikan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sesuai dengan Teori Efektifitas Hukum tersebut, maka UU Nomor 11 Tahun 2016 dikategorikan efektif jika terdapat dampak positif (meningkatkan kepatuhan hukum WP di Kota Pematangsiantar yang secara otomatis meningkatkan penerimaan Pemerintah dari sektor pajak), sehingga pada saat itu UU Nomor 11 Tahun 2016 mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku para WP sehingga menjadi perilaku hukum (mengikuti pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1).

Terhadap fakta hukum berupa masih rendahnya jumlah WP di Kota Pematangsiantar yang mengikuti Program *Tax Amnesty* Jilid 1, ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1 di Kota Pematangsiantar belum efektif. Penegasan ini disebabkan UU Nomor 11 Tahun 2016 belum dapat dikategorikan memberikan dampak positif berupa meningkatkan kepatuhan hukum WP di Kota Pematangsiantar yang secara otomatis meningkatkan penerimaan Pemerintah dari sektor pajak. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1 di Kota Pematangsiantar, UU Nomor 11 Tahun 2016 belum mencapai sasarannya (efektif) dalam membimbing ataupun merubah perilaku para WP di Kota Pematangsiantar, sehingga menjadi perilaku hukum.

Menurut Soedikno Mertokusumo:

Efektifitas Program Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak

“Hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah”.²⁰

Menurut Rony Andre Christian Naldo, dan Ningrum Natasya Sirait:

“Law is a political product established by the government to regulate the life of the people, by it's very nature of governing and forcing (Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa)”.²¹

Meskipun hukum pada hakekatnya bersifat mengatur dan memaksa, dalam pengimplementasian hukum pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, idealnya setiap subjek hukum (khususnya manusia) wajib memiliki kesadaran hukum untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sehingga setiap subjek hukum melakukan yang seyogyanya dilakukan berdasarkan hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum, yang dikemukakan oleh Paul Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa itu seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Sesuai dengan Teori Kesadaran Hukum yang dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka tentunya diharapkan kesadaran dari setiap WP di Kota Pematangsiantar tentang yang seyogyanya dilakukan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 dan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan terkait lainnya, sebagai realisasi kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Terhadap fakta hukum berupa belum efektifnya Program *Tax Amnesty* Jilid 1 terhadap peningkatan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar, tentunya terhadap fakta hukum tersebut harus dapat ditemukan solusinya. Penegasan ini

²⁰ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 39. Sebagaimana dikutip dari Rony Andre Christian Naldo, et.al. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. *Op.cit*, hal. 80.

²¹ Rony Andre Christian Naldo, and Ningrum Natasya Sirait. (2017). *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, Proceeding International Conference on Public Policy Social Computing and Development, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, v141, hal. 57.

didasarkan pada adagium hukum, yakni *lex semper dabit remedium*,²² yang berarti bahwa hukum selalu memberikan solusi.

Menurut Soerjono Soekanto:

“Tinggi rendahnya derajat kepatuhan terhadap Hukum Positif, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada 4 (empat) faktor:

1. Pengetahuan tentang peraturan. Pengetahuan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum, akan tetapi taraf pengetahuan yang tinggi tentang peraturan akan lebih menyempurnakan taraf kesadaran hukum;
2. Pengetahuan tentang isi peraturan. Pengetahuan tentang isi peraturan dipengaruhi oleh proses internalisasi dan imitasi yang ditentukan pula oleh faktor usia, tingkat pendidikan dan jangka waktu tinggal di suatu tempat dimana peraturan tadi berlaku, maka pengetahuan tentang isi peraturan mempengaruhi sikap terhadap peraturan dan taraf kesesuaian antara perikelakuan dengan peraturan;
3. Sikap terhadap peraturan. Sikap yang fundamental terhadap peraturan cenderung untuk mempengaruhi taraf kepatuhan hukum, oleh karena sikap tersebut antara lain terbentuk oleh proses pelemagaan dan internalisasi dari peraturan yang bersangkutan;
4. Perikelakuan yang sesuai dengan peraturan. Faktor ini merupakan kriterium pokok akan adanya kepatuhan hukum, oleh karena perikelakuan demikian menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat bahwa peraturan tersebut telah mengalami proses internalisasi yang membuktikan adanya persesuaian antara peraturan dengan nilai-nilai yang berlaku”.²³

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto di atas, ditegaskan bahwa kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar untuk mengikuti pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 1 dapat dipengaruhi 2 (dua) faktor utama, yakni pengetahuan tentang UU Nomor 11 Tahun 2016 dan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan terkait lainnya, serta pengetahuan tentang isi dari UU Nomor 11 Tahun 2016 dan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan terkait lainnya. Dengan demikian, guna meningkatkan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar, maka perlu dilakukan sosialisasi hukum. Terkait hal ini, maka idealnya KPP Pratama Pematangsiantar merangkul para Akademisi yang menguasai Ilmu Hukum dan/atau Ilmu Ekonomi dari Universitas Simalungun guna melakukan

²² Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2024). *Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan*. Pematangsiantar: Laporan Penelitian, Universitas Simalungun, hal. 5.

²³ Soerjono Soekanto. (1977). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, v7n6, hal. 468-469. Sebagaimana dikutip dari Rony Andre Christian Naldo. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. *Loc.cit*, hal. 225.

Efektifitas Program Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak

kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Program *Tax Amnesty* bagi para WP yang ada di Kota Pematangsiantar.

Pasca dilakukannya berbagai kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Program *Tax Amnesty* bagi para WP yang ada di Kota Pematangsiantar, dikaitkan dengan 2 (dua) faktor pendukung lainnya sesuai pendapat Soerjono Soekanto (sikap terhadap peraturan dan perikelakuan yang sesuai dengan peraturan), maka terhadap para WP yang tidak patuh untuk mengikuti pelaksanaan Program *Tax Amnesty* (Program *Tax Amnesty* Jilid 2 maupun yang selanjutnya), harus dilakukan penegakan hukum²⁴ secara tegas (sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan).

Penegakan hukum bagi WP dilakukan Pemerintah cq Menteri Keuangan cq Dirjen Pajak cq Kanwil Dirjen Pajak Sumatera Utara II cq KPP Pratama Pematangsiantar, dengan cara melakukan penagihan aktif, membuat Surat Teguran, membuat Surat Paksa, melaksanakan paksa badan (*gijzeling*), melaksanakan pemblokiran, melaksanakan sita, hingga melaksanakan lelang atas barang milik WP. Melalui dilakukannya sosialisasi hukum dan penegakan hukum, maka pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Jilid 2 maupun yang selanjutnya, dapat efektif guna meningkatkan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar untuk mengikutinya, yang secara otomatis meningkatkan penerimaan Pemerintah dari sektor pajak.

4. Kesimpulan

Program *Tax Amnesty* Jilid 1 telah dilaksanakan di Kota Pematangsiantar. Program *Tax Amnesty* Jilid 1 di Kota Pematangsiantar belum efektif meningkatkan kesadaran hukum WP. Terhadap fakta hukum tersebut, tentunya harus ditemukan solusinya. Adapun solusi guna meningkatkan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar sehingga pelaksanaan Program *Tax Amnesty* dapat dikategorikan efektif adalah dengan cara melakukan sosialisasi hukum dan penegakan hukum secara tegas bagi WP.

5. Referensi

Buku:

Budi Raharjo, et.al. (2003). *Dasar-dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran, Pelaporan*. Jakarta: Eko Jaya.

Richard Burton, dan Wirawan B. Ilyas. (2004). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

²⁴ Dalam hal penegakan hukum guna menciptakan keadilan, ada suatu adagium hukum oleh Lucius Calpurnius, yang sudah sepantasnya dijadikan pegangan teguh bagi aparat penegak hukum yakni *fiat justitia ruat caelum*, yang berarti bahwa hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Lihat Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2022). *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar-Yogyakarta: Nas Media Pustaka, hal. 8.

Efektifitas Program Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak

- Ridwan Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2021). *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
- (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- , et.al. (2022). *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar-Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Soedikno Mertokusumo. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty.
- , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jurnal dan Prosiding:

- Ellya Rosana. (2014). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, v10n1.
- Rony Andre Christian Naldo, and Ningrum Natasya Sirait. (2017). *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, Proceeding International Conference on Public Policy Social Computing and Development, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, v141.
- , et.al. (2019), *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, v6n1.

Penelitian:

- Buyung. (2023). *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)*. Pematangsiantar: Tesis, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun.
- Mardona Siregar. (2024). *Rekonstruksi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Disertasi, Program Studi Hukum, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

*Efektifitas Program Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum
Wajib Pajak*

Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2024). *Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan*. Pematangsiantar: Laporan Penelitian, Universitas Simalungun.

Website:

<https://www.hetanews.com/article/86074/tax-amnesty-berakhir-maret-wajib-pajak-diharapkan-mengikuti-program> (diakses tanggal 14 April 2024).

<https://www.kemenkeu.go.id/tax-amnesty> (diakses tanggal 20 Maret 2024).

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita> (diakses tanggal 20 Maret 2024).

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5000459/pps-tax-amnesty-jilid-ii-berakhir-intip-sederet-hasil-lengkapny> (diakses tanggal 20 Maret 2024).

<https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/tax-amnesty-jilid-2> (diakses tanggal 20 Maret 2024).